

SALINAN



MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
KLASIFIKASI ARSIP DI KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan dalam rangka mewujudkan proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan dan penyusutan arsip, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Klasifikasi Arsip di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009](#) tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);



2. [Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012](#) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. [Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015](#) tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83);
4. [Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015](#) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1665);
5. [Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012](#) tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip;
6. [Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014](#) tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan,



organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
4. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
5. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas arsip.

Pasal 2

- (1) Klasifikasi Arsip di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan merupakan acuan bagi unit organisasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam rangka pengelolaan Arsip Dinamis.
- (2) Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk kode yang terdiri atas huruf dan angka dan selanjutnya disebut Kode Klasifikasi Arsip.
- (3) Kode sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai pemisah Arsip atas dasar perbedaan yang ada serta pengelompokan Arsip atas dasar kesamaan jenis dan isi atau keterkaitan isi antara satu dengan yang lain.
- (4) Kode Klasifikasi Arsip digunakan sebagai dasar pemberkasan dan diberikan pada setiap naskah dinas yang masuk atau keluar dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 3

Susunan Kode Klasifikasi Arsip di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengikuti sifat permasalahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap unsur



yang ada dalam struktur organisasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yaitu:

- a. klasifikasi fasilitatif; dan
- b. klasifikasi substantif.

Pasal 4

- (1) Klasifikasi fasilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan klasifikasi yang berkaitan dengan kegiatan penunjang tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yaitu menyangkut pekerjaan pengorganisasian, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, pelayanan hukum, keuangan, kepegawaian, dan ketatausahaan.
- (2) Klasifikasi Substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan klasifikasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi sesuai dengan maksud dan tujuan dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang secara operasional substantif mempunyai kepentingan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 5

Kode Klasifikasi Arsip baik klasifikasi fasilitatif maupun klasifikasi substantif terdiri atas 3 (tiga) unsur, yaitu:

- a. pokok masalah;
- b. sub masalah; dan
- c. sub-sub masalah.

Pasal 6

- (1) Pokok masalah merupakan masalah utama yang terdapat pada klasifikasi diberi kode huruf ganda yang mengandung arti singkatan penyebutan pokok masalah.
- (2) Sub masalah merupakan bagian dari pokok masalah yang diberi kode angka secara berurutan dari 00 (nol nol), 01 (nol satu), dan seterusnya.



- (3) Sub-sub masalah merupakan bagian dari sub masalah yang diberi kode angka secara berurutan dari 00 (nol nol), 01 (nol satu), dan seterusnya yang diawali dengan 2 (dua) angka di depannya sesuai dengan kode sub masalah.

Pasal 7

Pemberian Kode Klasifikasi Arsip pada setiap naskah dinas, ditulis dengan susunan sebagai berikut:

- a. kode huruf untuk pengenalan pokok masalah ditempatkan pada bagian pertama dari susunan kode;
- b. kode angka untuk sub masalah ditempatkan pada bagian kedua;
- c. kode angka sub-sub masalah ditempatkan pada bagian ketiga dari susunan kode; dan
- d. tanda titik (.) ditulis sebagai pemisah antar unsur, sehingga penulisan Kode Klasifikasi Arsip menjadi pokok masalah, sub masalah, dan sub-sub masalah.

Pasal 8

Rincian lengkap Kode Klasifikasi Arsip di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor Per-16/Menko/Polhukam/12/2012 tentang Kode Klasifikasi Arsip Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor Per-16/Menko/Polhukam/12/2012 tentang Kode Klasifikasi Arsip Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan



Keamanan Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2017

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIRANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1019

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan,



Gama Haryo Putro



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
KLASIFIKASI ARSIP DI KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM,
DAN KEAMANAN

KODE KLASIFIKASI ARSIP
DI KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

KLASIFIKASI FASILITATIF

PR PERENCANAAN

00. Pokok-Pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan

00 Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)/*Master Plan*

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).

01 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

02 Rencana Strategis (Renstra)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra).

03 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional

Naskah-naskah terkait penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional.

01. Perencanaan Kinerja dan Anggaran

00 Penyiapan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan rencana anggaran Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mulai dari pengumpulan bahan, pemrosesan dan penetapan Pagu Indikatif, Pagu Definitif,



Rencana Kerja Anggaran (RKA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).

01 Rencana Kinerja Tahunan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penetapan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

02 Inisiatif Baru

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Program dan Anggaran berdasar Inisiatif Baru.

02. Penetapan Kinerja

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penetapan kinerja dengan atasan langsung seperti pimpinan tinggi pratama dengan pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi madya dengan pimpinan tinggi utama, pimpinan tinggi utama dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

03. Revisi Dokumen Anggaran

00 Revisi DIPA dan POK

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Revisi Anggaran.

01 Anggaran Belanja Tambahan (ABT)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Revisi Anggaran yang disebabkan oleh adanya Anggaran Belanja Tambahan (ABT).

02 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Revisi Anggaran yang disebabkan oleh adanya APBNP.

EP EVALUASI DAN PELAPORAN

00 Pemantauan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan pelaksanaan program-program di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mulai dari penyusunan rencana kegiatan pemantauan sampai pelaksanaan.



- 01 Evaluasi Program
 - 00 Evaluasi Program Unit Kerja

Naskah-naskah yang berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan program unit kerja mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan.
 - 01 Evaluasi Program Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan seluruh program Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan.
- 02 Laporan
 - 00 Laporan Berkala

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan laporan berkala pelaksanaan rencana kinerja unit kerja seperti laporan harian, laporan mingguan, bulanan, triwulan, laporan semester, dan laporan tahunan.
 - 01 Laporan Khusus/Laporan Insidental

Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan khusus, antara lain adalah laporan pemantauan prioritas, laporan pelaksanaan kegiatan atas permintaan eksternal, dan laporan atas pelaksanaan kegiatan/program tertentu seperti: pidato Presiden dan rapat dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
 - 02 Laporan Perkembangan (*Progress Report*)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan yang mencerminkan kemajuan tahapan pelaksanaan kinerja yang telah dicapai dalam kurun waktu tertentu (untuk kegiatan yang berkelanjutan yang memerlukan waktu lebih dari satu tahun).
 - 03 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan yang mengkomunikasikan pencapaian kinerja yang dicapai oleh unit kerja atau lembaga berdasarkan penetapan kinerja yang telah ditetapkan kepada pihak internal dan eksternal.



OT ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

00. Penataan Organisasi

00 Analisis Organisasi/Kelembagaan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses analisis dan evaluasi organisasi/kelembagaan.

01 Penyempurnaan Organisasi/Kelembagaan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perubahan dan penyempurnaan organisasi/kelembagaan.

01. Penataan Instrumen Jabatan

00 Analisis Jabatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penyusunan informasi jabatan struktural, fungsional tertentu, dan pelaksana.

01 Analisis Beban Kerja

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penyusunan data beban kerja jabatan struktural, fungsional tertentu, dan pelaksana.

02 Standar Kompetensi Jabatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penyusunan standar kompetensi manajerial dan standar kompetensi teknis jabatan struktural, fungsional tertentu, dan pelaksana.

03 Peta Jabatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penyusunan peta jabatan.

04 Evaluasi Jabatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penyusunan informasi faktor jabatan struktural, fungsional tertentu, dan pelaksana.

02. Penataan Tata Laksana

00 Penyusunan dan Penyempurnaan Proses Bisnis

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses analisis penyusunan dan evaluasi proses bisnis.

01 Penyusunan dan Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penyusunan dan penyempurnaan SOP Administrasi Pemerintahan.



- 02 Monitoring dan Evaluasi SOP Administrasi Pemerintahan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses monitoring/pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SOP Administrasi Pemerintahan.
- 03 Penyusunan dan Penyempurnaan Instrumen atau Pedoman Ketatalaksanaan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penyusunan dan penyempurnaan instrumen atau pedoman kerja (Fasilitasi Ketatalaksanaan).
03. Manajemen Reformasi Birokrasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perumusan, persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan kemajuan reformasi birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan termasuk penetapan Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

DI DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

- 00 Pengelolaan Data
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan data kinerja instansi mulai dari proses pengumpulan data, pengolahan data, sampai dengan penyajian data.
- 01 Teknologi Informasi
 - 00 Rencana strategis/*master plan* Pembangunan Sistem Informasi (SIM)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan sistem informasi meliputi penyusunan dan penetapan rencana strategis (*master plan*) pembangunan manajemen sistem informasi
 - 01 Dokumentasi Arsitektur dan Implementasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan dokumen arsitektur dan implementasi aplikasi (*e-office*, Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, dan lain-lain) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan beserta infrastrukturnya termasuk pengelolaan *website*.



- 02 Perekaman dan Pemutakhiran Data
Naskah-naskah yang berkaitan dengan perekaman dan pemutakhiran data.
- 03 Migrasi Sistem Aplikasi dan Data
Naskah-naskah yang berkaitan dengan migrasi sistem aplikasi dan data mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan migrasi.
- 04 Dokumen Hosting
Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen hosting.
- 05 Layanan *Back Up* Data Digital
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan layanan *Back Up* Data Digital.

PS PERPUSTAKAAN

- 00. Pengadaan Bahan Pustaka
 - 00 Pembelian Bahan Pustaka
Naskah-naskah terkait pengadaan bahan pustaka melalui pembelian mulai dari penyusunan daftar pemesanan buku, pengajuan usulan sampai dengan pembelian termasuk berita acara serah terima buku.
 - 01 Hibah
Naskah-naskah terkait pengadaan bahan pustaka melalui hibah.
 - 02 Sumbangan
Naskah-naskah terkait pengadaan bahan pustaka melalui sumbangan dari instansi lain.
 - 03 Kerjasama
Naskah-naskah terkait pengadaan bahan pustaka melalui kerjasama dengan kementerian/lembaga lain.
- 01. Pengolahan Bahan Pustaka
 - 00 Inventarisasi
Naskah-naskah terkait proses penginputan data bahan pustaka ke buku induk, katalogisasi, penyusunan data bibliografi, penentuan abstrak dan labelisasi bahan pustaka.
 - 01 Pemeliharaan dan Perawatan Bahan Pustaka



Naskah-naskah terkait kegiatan pemeliharaan dan perawatan bahan pustaka.

02 *Stock Opname*

Naskah-naskah terkait kegiatan *stock opname*.

03 Penyiangan

Naskah-naskah terkait kegiatan penyiangan bahan pustaka.

02. Layanan Perpustakaan

00 Sirkulasi Bahan Pustaka

Naskah-naskah terkait sirkulasi bahan pustaka meliputi peminjaman bahan pustaka, layanan rujukan, dan literasi informasi termasuk penyusunan kartu buku.

01 Keanggotaan Perpustakaan

Naskah-naskah terkait dengan keanggotaan perpustakaan mulai dari pendaftaran sampai dengan pemberhentian.

PH PRODUK HUKUM

00. Penyusunan Produk Hukum yang Bersifat Pengaturan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan/atau fasilitasi penyusunan produk hukum yang bersifat mengatur mulai dari persiapan, analisis, penyusunan, pengoordinasian, perumusan, dan pembahasan sampai dengan pengesahannya.

01. Penyusunan Produk Hukum yang Bersifat Penetapan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan/atau fasilitasi penyusunan produk hukum yang bersifat penetapan (Keputusan), sejak awal proses sampai dengan penandatanganan.

02. Dokumentasi Produk Hukum

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

03. Publikasi Produk Hukum

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan publikasi produk hukum seperti kegiatan sosialisasi produk hukum dan penyebaran produk/instrumen hukum kepada lembaga, masyarakatm, dan/atau perorangan.

04. Telaah Produk Hukum/Perjanjian/Akta



Naskah-naskah yang berkaitan dengan penelaahan produk hukum Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan termasuk telaah perjanjian dan akta dan penelaahan produk hukum di bidang politik, hukum, dan keamanan.

05. Pemberian Pertimbangan dan Advokasi Hukum

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan dan fasilitasi pemberian pertimbangan dan advokasi hukum.

SD PERSIDANGAN

00. Rapat Koordinasi Tingkat Menteri

00 Rapat Paripurna Tingkat Menteri (RPTM)

Naskah-naskah terkait perencanaan, penyiapan naskah persidangan, pelaksanaan, pendokumentasian administrasi, dan penatausahaan Rapat Paripurna Tingkat Menteri (RPTM), termasuk didalamnya pelaksanaan perekaman dan transkrip, penyusunan notulensi, dan resume persidangan serta kegiatan penyusunan risalah persidangan dan pengelolaan hasil risalah persidangan.

01 Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (Rakor Tingkat Menteri)

Naskah-naskah terkait perencanaan, penyiapan naskah persidangan, pelaksanaan, pendokumentasian administrasi, dan penatausahaan Rakor Tingkat Menteri, termasuk didalamnya pelaksanaan perekaman dan transkrip, penyusunan notulensi, dan resume persidangan serta kegiatan penyusunan risalah persidangan dan pengelolaan hasil risalah persidangan.

02 Rapat Menteri dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Naskah-naskah terkait perencanaan, penyiapan naskah persidangan, pelaksanaan, pendokumentasian administrasi, dan penatausahaan Rapat Menteri dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, termasuk didalamnya pelaksanaan perekaman dan transkrip, penyusunan notulensi, dan resume persidangan serta kegiatan penyusunan risalah persidangan dan pengelolaan hasil risalah persidangan.

01. Rapat Koordinasi Tingkat Pimpinan Tinggi Madya



Naskah-naskah terkait perencanaan, penyiapan naskah persidangan, pelaksanaan, pendokumentasian administrasi, dan penatausahaan Rapat Koordinasi Tingkat Pimpinan Tinggi Madya, termasuk didalamnya pelaksanaan perekaman dan transkrip, penyusunan notulensi, dan resume persidangan serta kegiatan penyusunan risalah persidangan dan pengelolaan hasil risalah persidangan.

02. Rapat Internal Staf (RIS)

00 Rapat Internal Staf Pimpinan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Naskah-naskah terkait perencanaan, penyiapan naskah persidangan, pelaksanaan, pendokumentasian administrasi, dan penatausahaan RIS pimpinan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, termasuk didalamnya pelaksanaan perekaman dan transkrip, penyusunan notulensi, dan resume persidangan serta kegiatan penyusunan risalah persidangan dan pengelolaan hasil risalah persidangan.

01 Rapat Internal Staf Pimpinan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

02 Naskah-naskah terkait perencanaan, penyiapan naskah persidangan, pelaksanaan, pendokumentasian administrasi, dan penatausahaan RIS pimpinan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, termasuk didalamnya pelaksanaan perekaman dan transkrip, penyusunan notulensi, dan resume persidangan serta kegiatan penyusunan risalah persidangan dan pengelolaan hasil risalah persidangan.

HM KEHUMASAN

00. Peliputan dan Dokumentasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan, dan peristiwa-peristiwa penting dalam berbagai media seperti foto, video, rekaman suara, dan multimedia.

01. Penyajian Informasi

00 Publikasi



Naskah-naskah yang berkaitan dengan publikasi/penyebarnya informasi antara lain poster, buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan isi *website*.

01 Penerbitan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerbitan bulletin/majalah/jurnal/surat kabar/naskah sumber/karya ilmiah dan populer serta kegiatan lain semacamnya mulai dari perencanaan sampai penyebaran.

02 Pers/Media Massa

Naskah-naskah yang berkaitan dengan masalah penerangan yang dilakukan melalui media massa seperti surat kabar, radio, televisi, dan lain semacamnya berupa wawancara dan konferensi pers/*press release* dari pemberitaan lain.

02. Keterbukaan Informasi Publik

Naskah-naskah yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik termasuk didalamnya kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

03. Hubungan Antar Lembaga

00 Lembaga Negara

Naskah-naskah terkait hubungan antar lembaga dengan Kementerian/Lembaga Negara serta Pemerintah Daerah.

01 Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat

Naskah-naskah terkait hubungan antar lembaga dengan Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat.

02 Perusahaan

Naskah-naskah terkait hubungan antar lembaga dengan perusahaan.

03 Perguruan Tinggi/Sekolah

Naskah-naskah terkait hubungan antar lembaga dengan perguruan tinggi/sekolah.

04 Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat



Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan forum kehumasan dan/atau forum Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat.

05 Pendapat Umum

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian masukan dan saran dari praktisi/para ahli tentang penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan beserta tanggapannya.

04. Tanda Penghargaan, Kenang-kenangan, dan Ucapan

00 Penghargaan/tanda kenang-kenangan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian tanda penghargaan dan kenang-kenangan kepada masyarakat/tokoh negara/tamu negara/pejabat negara yang memiliki jasa prestasi besar.

01 Ucapan duka/terima kasih/permohonan maaf

Naskah-naskah yang berkaitan dengan ucapan (terima kasih, bela sungkawa, atau permohonan maaf) kepada masyarakat/tokoh negara/tamu negara/pejabat negara.

TU KETATAUSAHAAN

00. Persuratan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan/pengelolaan surat masuk dan surat keluar, seperti kegiatan penomoran surat, pengarahan, pencatatan, dan pendistribusian surat, penggunaan cap/stempel dan pengiriman surat/barang cetakan.

00 Pengurusan Surat Masuk

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan surat masuk

01 Pengurusan Surat Keluar

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan surat keluar.

01. Kearsipan

00 Penyusunan Sistem

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan sistem kearsipan meliputi kode klasifikasi, jadwal retensi arsip, sistem keamanan, dan akses arsip termasuk pedoman dan petunjuk teknis kearsipan



- 01 Pengelolaan Arsip Aktif
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penataan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pengolahan arsip aktif.
- 02 Pengelolaan Arsip Inaktif
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penataan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pengolahan arsip inaktif.

- 03 Pembinaan dan Konsultasi Kearsipan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan dan konsultasi kearsipan.
02. Monitoring dan Evaluasi Sistem Kearsipan
Naskah-naskah yang berkaitan tentang kegiatan monitoring/pengawasan dan evaluasi sistem kearsipan yang diterapkan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
03. Keprotokolan
 - 00 Upacara/Acara Kedinasan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan protokoler termasuk upacara bendera, upacara hari besar, upacara pelantikan, dan upacara serah terima jabatan.
 - 01 Agenda Pimpinan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, penjadwalan, dan pelaksanaan agenda pimpinan antara lain agenda rapat pimpinan dan jadwal kegiatan pimpinan dan sebagainya.
 - 02 Kunjungan Dalam Negeri
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kunjungan dinas dalam negeri.
 - 03 Kunjungan Luar Negeri
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kunjungan dinas luar negeri.
 - 04 Sambutan/Pidato
Naskah-naskah yang berkaitan dengan administrasi dan penyiapan sambutan/pidato meliputi bahan sambutan/pidato Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan termasuk sambutan/pidato Menteri Koordinator Bidang



Politik, Hukum, dan Keamanan/Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan/pejabat pimpinan tinggi madya.

KP KEPEGAWAIAN

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan penyiapan perencanaan dan pengembangan pegawai, pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan kepegawaian, dan pelaksanaan penerapan disiplin dan kesejahteraan pegawai.

00 *Bezzeting*/Persediaan Pegawai

Naskah-naskah yang berkaitan dengan *bezzeting*/persediaan pegawai.

01 Formasi Pegawai

00 Penyusunan Usulan Formasi Pegawai

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengusulan formasi oleh unit kerja dan pengumpulan bahan untuk penyusunan usulan formasi termasuk rencana penempatan pegawai dan rencana penetapan klasifikasi pendidikan.

01 Pengajuan usulan formasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan permintaan formasi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara sampai dengan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta penetapan formasi (kecuali formasi khusus).

02 Penetapan Formasi khusus

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penetapan formasi khusus.

02 Pengadaan dan Penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil

00 Penerimaan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penerimaan pegawai mulai dari pengumuman, lamaran, pemanggilan, test sampai dengan pengumuman penerimaan.

01 Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil termasuk nota usul penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP)

02 Orientasi CPNS



Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil seperti pembekalan Calon Pegawai Negeri Sipil dan program magang Calon Pegawai Negeri Sipil di unit kerja.

03 Prajabatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi pendidikan prajabatan.

04 Penempatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil di unit-unit kerja.

05 Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil mulai dari pemeriksaan kesehatan sampai dengan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, termasuk nota usul pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.

03 Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penerimaan pejabat mulai dari pengumuman, lamaran, pemanggilan, test sampai dengan pengumuman penerimaan.

04 Pengangkatan dan Pemberhentian

00 Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural.

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengangkatan dalam jabatan struktural mulai dari usul sampai penetapan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.

01 Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional tertentu

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengangkatan dalam jabatan fungsional tertentu mulai dari usul, penilaian angka kredit sampai penetapan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.

02 Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional Umum



Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengangkatan dalam jabatan fungsional umum mulai dari usul sampai penetapan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.

03 Alih Tugas

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan alih tugas pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, seperti pindah antar instansi, pegawai yang diperkerjakan, dan pegawai yang diperbantukan ke instansi lain dan pemindahan sementara termasuk rotasi antar unit dalam rangka pemantapan tugas.

04 Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pertimbangan jabatan dan pangkat, termasuk di dalamnya pembentukan tim, usulan promosi jabatan, perencanaan, pengumpulan dan penyusunan bahan, penyelenggaraan dan hasil Baperjakat.

05 Pendelegasian Wewenang (Plt/Plh)

00 Pelaksana Tugas (Plt)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penunjukan pejabat pelaksana tugas untuk mengisi kekosongan jabatan yang belum diisi secara definitif.

01 Pelaksana Harian (Plh)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penunjukan pejabat pelaksana harian dikarenakan pejabat definitif tidak menjalankan tugas secara optimal (tugas luar, cuti, sakit, atau mengikuti pendidikan dan pelatihan)

06 Kenaikan Pangkat/Golongan

00 Kenaikan Pangkat/Golongan Pegawai Negeri Sipil organik

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kenaikan pangkat/golongan Pegawai Negeri Sipil organik Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

01 Kenaikan Pangkat/Golongan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.



Naskah-naskah yang berkaitan dengan kenaikan pangkat/golongan Pegawai Negeri Sipil dari instansi lain yang dipekerjakan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

- 02 Kenaikan Pangkat Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kenaikan pangkat prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipekerjakan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

- 03 Kenaikan Pangkat, Golongan, dan Jenjang Jabatan Fungsional Tertentu

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kenaikan pangkat/golongan/jenjang jabatan fungsional tertentu termasuk proses penetapan angka kredit.

- 07 Daftar Urut Kepangkatan (DUK)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan DUK

- 08 Pembinaan Karier Pegawai

- 00 Kompetensi Pegawai

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan standar kompetensi pegawai sampai dengan penilaian kompetensi pegawai termasuk ujian kompetensi/*Assessment test*

- 01 Pemetaan/*talent mapping* pegawai

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemetaan/*talent mapping* pegawai

- 02 Ujian Penyesuaian Ijazah

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian penyesuaian ijazah bagi pegawai.

- 03 Ujian Dinas

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian dinas bagi pegawai

- 04 Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelatihan penjurangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan,



pelaporan, dan evaluasi diklat penjenjangan pegawai dari tingkat eselon I sampai dengan tingkat eselon IV

- 05 Pendidikan dan Pelatihan Teknis/Fungsional/ Kursus
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional/kursus mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi.
- 06 Tugas Belajar
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembangan karier pegawai berupa tugas belajar mulai dari usulan sampai dengan penerbitan keputusan penetapan tugas belajar dan laporan berkala pelaksanaan tugas belajar.
- 07 Izin Belajar
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembangan karier pegawai berupa tugas belajar mulai dari usulan sampai dengan penerbitan keputusan penetapan izin belajar dan laporan berkala pelaksanaan izin belajar.
- 08 Prestasi Kerja Pegawai
Naskah-naskah yang berkaitan dengan usul dan penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilai Prestasi Kerja Pegawai.
- 09 Perselisihan/Sengketa Kepegawaian
Naskah-naskah yang berkaitan dengan perselisihan/sengketa kepegawaian mulai dari proses pengajuan sampai dengan penetapan termasuk pengajuan keberatan pegawai serta bantuan/advokasi hukum bagi pegawai.
- 10 Disiplin Pegawai
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan disiplin pegawai berupa daftar hadir pegawai, rekapitulasi daftar hadir, laporan disiplin pegawai, dan surat keterangan ketidakhadiran/hadir dan pulang tidak pada waktunya. Termasuk naskah-naskah tentang seluruh proses pemberian hukuman disiplin mulai dari dugaan pelanggaran, berita acara sampai dengan penetapan Keputusan oleh pejabat berwenang.
- 09 Administrasi Pegawai
- 00 Data/Keterangan Pegawai



- Naskah-naskah yang berkaitan dengan data pegawai dan keterangan pegawai.
- 01 Kartu Pegawai
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengurusan kartu pegawai.
 - 02 Kartu Istri/Kartu Suami
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengurusan Kartu Istri (Karis) atau Kartu Suami (Karsu).
 - 03 Penyesuaian Masa Kerja
Naskah-naskah yang berkaitan dengan perhitungan masa kerja untuk penyesuaian ruang gaji.

 - 04 Kenaikan Gaji Berkala (KGB)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kenaikan Gaji Berkala (KGB).
 - 05 Mutasi Keluarga
Naskah-naskah yang berkaitan dengan usulan dan penetapan penyesuaian tunjangan pegawai termasuk proses pengurusan surat izin pernikahan/perceraian.
 - 06 Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan KP4
 - 07 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan LHKPN
- 10 Kesejahteraan Pegawai
- 00 Penghargaan dan Tanda Jasa
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian penghargaan berupa piagam/tanda jasa (Bintang Satyalencana dan sejenisnya) mulai dari surat usulan sampai dengan penetapan dan penyerahan
 - 01 Cuti
Naskah-naskah yang berkaitan dengan cuti pegawai yang meliputi cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin, cuti tahunan, cuti alasan penting, dan cuti diluar tanggungan negara mulai usul sampai dengan penetapan
 - 02 Pemeliharaan Kesehatan Pegawai



Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesehatan pegawai dari aspek preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif seperti penyelenggaraan poliklinik, pemeriksaan kesehatan pegawai, peningkatan wawasan kesehatan serta pengurusan administrasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

03 Tabungan Pensiun (Taspen)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembuatan kartu dan layanan Taspen.

04 Tabungan Perumahan (Bapetarum)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan layanan Tabungan Perumahan.

05 Bantuan Sosial

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian bantuan atau tunjangan sosial kepada pegawai dan keluarganya yang mengalami musibah termasuk didalamnya bantuan sosial yang diberikan oleh atau kepada pihak lain, sumbangan-sumbangan lainnya.

06 Konsultasi dan Pembinaan Mental Pegawai

Naskah-naskah yang berkaitan dengan konsultasi pegawai dan bimbingan mental pegawai termasuk didalamnya kegiatan keagamaan dan *capacity building*.

07 Olahraga/Kesenian/Rekreasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan olahraga/kesenian/rekreasi.

08 Koperasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Koperasi.

09 Fasilitas Pegawai

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan fasilitas pegawai seperti pakaian dinas, ruang menyusui, penitipan anak, perumahan, transportasi antar jemput pegawai, dan fasilitas lainnya.

11 Pemberhentian Pegawai

00 Dengan Hormat



Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberhentian pegawai dengan hormat karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri, penyederhanaan organisasi, dan tidak cakap jasmani dan rohani mulai dari pengajuan permohonan sampai dengan dikeluarkannya Keputusan pemberhentian.

01 Tidak Dengan Hormat

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberhentian pegawai dengan tidak hormat karena melanggar sumpah/janji pegawai negeri sipil dan sumpah/janji jabatan, dan dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap mulai dari pengajuan permohonan sampai dikeluarkannya Keputusan pemberhentian.

02 Pensiun

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pensiun pegawai, pensiun janda/duda.

03 Pemberhentian Sementara

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberhentian sementara pegawai

12 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

13 Dharma Wanita

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan organisasi Dharma Wanita Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

14 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penerimaan PPNPN mulai dari usulan dari unit kerja, pengumuman, lamaran, pemanggilan, tes sampai dengan penerimaan, penempatan, pendataan serta pembinaannya.

15 Pengarusutamaan Gender

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kebijakan dan program pengarusutamaan gender meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan.



PL PERLENGKAPAN

00. Perencanaan Kebutuhan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan perencanaan dalam hal pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan termasuk permintaan atau pengusulan rencana kebutuhan barang/jasa dari unit kerja.

01. Pengadaan Barang dan Jasa

00 Pengadaan Barang

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang, mulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan penerimaan barang yang dibuktikan dengan pembuatan Berita Acara Serah Terima.

01 Pengadaan Jasa Lainnya

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan jasa lainnya, mulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan penerimaan barang yang dibuktikan dengan pembuatan Berita Acara Serah Terima.

02 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan pekerjaan konstruksi lainnya, mulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan penerimaan barang yang dibuktikan dengan pembuatan berita acara serah terima.

03 Pengadaan Jasa Konsultasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan Jasa Konsultasi lainnya, mulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan penerimaan barang yang dibuktikan dengan pembuatan berita acara serah terima.

04 Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan administrasi Unit Layanan Pengadaan.

02. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

00 Pejabat Pengguna BMN

Naskah-naskah yang terkait dengan proses penetapan Kuasa Pengguna Barang Milik Negara Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.



- 01 Pergudangan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pergudangan, meliputi kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran dari gudang.
- 02 Penggunaan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penggunaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- 03 Pemanfaatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemanfaatan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. yang meliputi sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna, dan kerja sama penyediaan infrastruktur.
- 04 Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pengamanan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. yang meliputi pengamanan administrasi, fisik, dan hukum, termasuk pelaporan kerusakan, dan pemeliharaan/perawatan bangunan kantor, perawatan inventaris kantor, pemeliharaan alat telekomunikasi dan server/*hosting*, dan perbaikan kendaraan dinas.
- 05 Penilaian
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penilaian Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- 06 Pemindahtanganan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemindahtanganan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- 07 Pemusnahan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pengusulan pemusnahan, persetujuan, dan pelaksanaan pemusnahan



Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

08 Penghapusan Barang Milik Negara

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penghapusan barang mulai dari persiapan/pembentukan panitia penghapusan, usul penghapusan, penilaian, pelelangan, sampai dengan pelaporan termasuk berita acaranya.

03. Penatausahaan Barang Milik Negara

00 Pembukuan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pembukuan meliputi pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Negara dan penyusunan daftar barang penggunaan/daftar Barang Kuasa Pengguna dan daftar Barang Milik Negara.

01 Inventarisasi Barang Milik Negara

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan inventarisasi Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

02 Laporan Barang Milik Negara

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan laporan Barang Milik Negara yang terdiri dari laporan semesteran dan tahunan.

04. Pengawasan dan Pengendalian

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara mulai dari pemantauan penggunaan, pengamanan, penertiban aset, pelaporan pengawasan, sampai dengan pengendalian Barang Milik Negara.

RT RUMAH TANGGA

00. Penggunaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

00 Gedung dan Bangunan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan administrasi penggunaan dan pemeliharaan gedung, auditorium/aula, ruang rapat, rumah dinas, dan wisma.

01 Kendaraan Dinas



Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan angkutan atau kendaraan dinas seperti formulir permohonan penggunaan kendaraan dinas.

02 Instalasi/jaringan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan administrasi penggunaan dan pemeliharaan sarana instalasi air/listrik/telekomunikasi, *Local Area Network* (LAN), penerangan, dan peralatan kantor lainnya.

01. Keamanan dan Ketertiban

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan keamanan dan ketertiban kantor, termasuk pengelolaan parkir.

02. Pelayanan Rapat dan Urusan Dalam

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan rapat dan urusan dalam seperti permintaan pelayanan, proses pelayanan rapat termasuk pertanggungjawabannya.

03. Pertamanan dan Kebersihan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan administrasi pengelolaan kebersihan gedung dan taman.

KU ADMINISTRASI KEUANGAN

00. Pelaksanaan Anggaran

00 Pejabat Pengelola Keuangan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pejabat pengelola keuangan berupa penetapan: Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), kuasa pengguna Barang/Jasa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pembuat Daftar Gaji, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran, staf pengelola keuangan, dan Pengelola Barang.

01 Pendapatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pendapatan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yang terdiri dari: Surat Setoran Pajak (SSP), dana bagi hasil yang bersumber dari pajak, penerimaan sisa anggaran lebih dari saldo kas atau surat setoran pengembalian belanja (SSPB), bunga, dan atau jasa giro



- pada Bank, piutang negara, pengelolaan investasi, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).
- 02 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
 - 03 Pengeluaran Anggaran/Belanja
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pengeluaran anggaran/belanja, mulai dari Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), sampai dengan terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), termasuk naskah-naskah terkait petunjuk pelaksanaan/mechanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
 - 04 Penggajian dan Tunjangan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran gaji pegawai berupa daftar gaji pegawai, kartu gaji, dan bukti pembayarannya serta tunjangan pegawai.
 - 05 Tunjangan Kinerja dan Uang Makan.
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengurusan tunjangan kinerja dan uang makan.
01. Pengelolaan Perbendaharaan
 - 00 Pajak
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penerimaan dan pembayaran pajak.
 - 01 Pembukuan Anggaran
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembukuan anggaran, berupa Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Kas Pembantu (BKP), kartu-kartu realisasi anggaran, dan kartu pengawasan, termasuk Rekening Koran Bank, Berita Acara Pemeriksaan Kas, Kas/Register Penutupan Kas Laporan Pendapatan Negara, dan Laporan Keadaan Kredit Anggaran (LKKA) Bulanan/Triwulan/Semesteran, Berita Acara Rekonsiliasi antara Satuan Kerja dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
 - 02 Rekening Pemerintah
Naskah-naskah yang berkaitan dengan rekening pemerintah.



03 Verifikasi Anggaran

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan yang berkaitan dengan pengujian/penelitian kebenaran pertanggungjawaban pengeluaran disertai dengan dokumen pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran anggaran.

04 Pinjaman/Bantuan/Hibah Luar Negeri

Naskah Dinas yang berkaitan dengan pinjaman/bantuan/hibah dari luar negeri.

02. Ketatausahaan Keuangan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan dengan kegiatan permintaan dan penerbitan Keterangan Penghasilan, Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) serta permohonan pinjaman.

03. Laporan Keuangan

00 Laporan Keuangan Bulanan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan dan penetapan laporan keuangan bulanan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

01 Laporan Keuangan Triwulanan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan dan penetapan laporan keuangan triwulanan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

02 Laporan Keuangan Semesteran

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan dan penetapan laporan keuangan semesteran yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

03 Laporan Keuangan Tahunan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan dan penetapan laporan keuangan tahunan yang terdiri dari



Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

04 Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI).

04. Pertanggungjawaban Keuangan Negara

00 Laporan Hasil Pemeriksaan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan tindak lanjutnya.

01 Dokumen Penyelesaian Keuangan Negara

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan.

RK REKOMENDASI KEAHLIAN

00 Rekomendasi Isu-Isu Strategis

Naskah-naskah yang berkaitan dengan perumusan rekomendasi yang terkait dengan isu strategis politik, hukum, dan keamanan di bidang ideologi dan konstitusi, ketahanan nasional, kedaulatan wilayah dan kemaritiman, perekonomian, sumber daya manusia dan teknologi, dan sumber daya alam dan lingkungan hidup mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan sampai dengan tindak lanjut hasil rekomendasi.

PW PENGAWASAN

00 Perencanaan Kebijakan Pengawasan

00 Perencanaan Pengawasan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan rencana pengawasan mulai dari penyusunan, penetapan sampai dengan pemantauan rencana, dan program pengawasan.

01 Kerjasama Pengawasan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kerjasama pengawasan mulai dari penyusunan sampai dengan penetapan kerjasama pengawasan.

01 Audit/Pemeriksaan

00 Audit Kinerja

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan audit kinerja yang meliputi audit kepegawaian, audit pengelolaan



keuangan negara, audit pengelolaan Barang Milik Negara, dan audit Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mulai dari penyusunan dan penetapan rencana pemeriksaan, surat-menyurat, surat penugasan, sampai dengan pelaporan.

01 Audit dengan Tujuan Tertentu dan Pemeriksaan Khusus
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu dan pemeriksaan khusus yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana pemeriksaan, surat-menyurat, surat penugasan, sampai dengan pelaporan.

02 *Probity Audit*

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan audit pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana pemeriksaan, surat-menyurat, surat penugasan, sampai dengan pelaporan.

02 Reviu

00 Reviu Laporan Keuangan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan reviu laporan keuangan yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana reviu, surat-menyurat, surat penugasan, sampai dengan pelaporan.

01 Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) atau Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan reviu RKA-KL dan reviu revisi RKA-KL yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana reviu, surat-menyurat, surat penugasan, sampai dengan pelaporan.

02 Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan reviu penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana reviu, surat-menyurat, surat penugasan, sampai dengan pelaporan.

03 Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK-BMN)



Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan rewiu RK-BMN yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana rewiu, surat-menyurat, surat penugasan, sampai dengan pelaporan.

- 04 Rewiu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan rewiu LAKIP Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana rewiu, surat-menyurat, surat penugasan, sampai dengan pelaporan.

03 Evaluasi

- 00 Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Eselon I

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Evaluasi Implementasi SAKIP Eselon I mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan.

- 01 Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Evaluasi PMPRB mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan.

- 02 Evaluasi Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Evaluasi Penilaian Maturitas SPIP mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan.

- 03 Evaluasi Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan evaluasi penilaian kapabilitas APIP mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan.

- 04 Evaluasi Penilaian Zona Integritas (ZI)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan evaluasi penilaian ZI mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan.



04 Pemantauan

00 Tindak Lanjut Monitoring Hasil Pemeriksaan Internal

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan internal termasuk didalamnya pemantauan terhadap kerugian negara yang meliputi Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sampai dengan laporan penyelesaian TP-TGR dan pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (TLLHP) sampai dengan pelaporan.

01 Tindak Lanjut Monitoring Hasil Pemeriksaan Eksternal

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal termasuk didalamnya pemantauan terhadap kerugian negara yang meliputi Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sampai dengan laporan penyelesaian TP-TGR dan pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (TLLHP) sampai dengan pelaporan.

02 Pengaduan Masyarakat

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemantauan terhadap tindak lanjut pengaduan masyarakat kepada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

05 Konsultan

00 Pedoman Pengawasan Internal

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan pedoman terkait kegiatan pengawasan sampai dengan penetapan, bimbingan teknis, maupun sosialisasinya.

01 Pembinaan Komitmen Anti Korupsi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pembinaan komitmen anti korupsi antara lain meliputi, penancangan/penguatan Zona Integritas (ZI), program dan kegiatan wilayah bebas dari korupsi (WBK), penilaian dan penetapan WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), sosialisasi anti korupsi, kampanye anti korupsi,



penerapan sistem peringatan dini (*early warning system*)
penetapan pejabat anti korupsi dan sebagainya.

02 *Whistleblowing System*

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan, penerapan serta penguatan *Whistleblowing System* di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

03 Pendampingan Pemeriksaan BPK RI

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pendampingan pemeriksaan BPK RI kepada unit kerja.

04 Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) mulai dari persiapan, pelaksanaan, penilaian, penetapan unit kerja terbaik, satuan pelaksana pengendalian intern, Pembina SPIP terbaik, pemantauan dan pelaporan, dan sebagainya.

05 Pengelolaan Gratifikasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan gratifikasi mulai dari persiapan, koordinasi, pelaksanaan, pengadministrasian, tindak lanjut atas pelaporan gratifikasi, penghargaan, dan saksi serta pelaporan.

06 Forum Pengawasan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan forum pengawasan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, sampai dengan evaluasi.

FUNGSI SUBSTANTIF

DN POLITIK DALAM NEGERI

00 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik dalam negeri.

00 Kelembagaan Demokrasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyelenggaraan forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/*workshop*



tentang isu di bidang kelembagaan dan penguatan demokrasi.

01 Desentralisasi dan Otonomi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyelenggaraan forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/*workshop* tentang isu di bidang desentralisasi, otonomi daerah, dan otonomi khusus.

02 Organisasi Masyarakat Sipil dan Partai Politik

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyelenggaraan forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/*workshop* tentang isu di bidang pengawasan organisasi masyarakat dan penguatan partai politik.

03 Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyelenggaraan forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/*workshop* tentang isu di bidang pemilihan legislatif, Presiden, dan Wakil Presiden, dan pemilihan kepala daerah.

01 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik dalam negeri.

02 Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik dalam negeri

00 Kelembagaan Demokrasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang kelembagaan dan penguatan demokrasi.

01 Desentralisasi dan Otonomi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang desentralisasi, otonomi daerah, dan otonomi khusus.



- 02 Organisasi Masyarakat Sipil dan Partai Politik
Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang pengawasan organisasi masyarakat sipil dan penguatan partai politik.
- 03 Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang pemilihan legislatif, Presiden, dan Wakil Presiden, dan pemilihan kepala daerah.

LN POLITIK LUAR NEGERI

- 00 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik luar negeri.
- 00 Kerjasama Asia, Pasifik, dan Afrika
Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyelenggaraan forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/*workshop* tentang isu politik, hukum, dan keamanan di bidang kerja sama bilateral dan regional Asia dan Pasifik, serta Afrika dan Timur Tengah.
- 01 Kerja Sama Amerika dan Eropa
Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyelenggaraan forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/*workshop* tentang isu politik, hukum, dan keamanan di bidang kerja sama bilateral dan regional Amerika dan Eropa.
- 02 Kerja Sama *Association of South East Asia Nations* (ASEAN)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyelenggaraan forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/*workshop* tentang isu di bidang politik, pertahanan, keamanan, dan hukum dan hak asasi manusia ASEAN.
- 03 Kerja Sama Organisasi Internasional



Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyelenggaraan forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/*workshop* tentang isu kerja sama multilateral di bidang politik, pertahanan, keamanan, hukum, dan hak asasi manusia, serta kemanusiaan.

01 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik luar negeri.

02 Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik luar negeri.

00 Kerjasama Asia, Pasifik, dan Afrika

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu politik, hukum, dan keamanan di bidang kerja sama bilateral dan regional Asia dan Pasifik, serta Afrika dan Timur Tengah.

01 Kerja Sama Amerika dan Eropa

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu politik, hukum, dan keamanan di bidang kerja sama bilateral dan regional Amerika dan Eropa.

02 Kerja Sama ASEAN

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang politik, pertahanan, keamanan, dan hukum dan hak asasi manusia ASEAN.

03 Kerja Sama Organisasi Internasional

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu kerja sama multilateral di bidang politik, pertahanan, keamanan, hukum, dan hak asasi manusia, serta kemanusiaan.



00 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hukum dan hak asasi manusia.

00 Materi Hukum

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyelenggaraan forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/*workshop* tentang isu di bidang materi hukum publik dan privat.

01 Penegakan Hukum

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyelenggaraan forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/*workshop* tentang isu di bidang penyelesaian kasus hukum, budaya hukum, dan pemberdayaan aparatur hukum.

02 Hukum Internasional

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyelenggaraan forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/*workshop* tentang isu di bidang hukum laut, hukum dirgantara, dan hukum humaniter.

03 Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyelenggaraan forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/*workshop* tentang isu di bidang pemajuan hak asasi manusia, perlindungan, dan penghormatan hak asasi manusia.

01 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hukum dan hak asasi manusia.

02 Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

00 Materi Hukum



Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang materi hukum publik dan privat.

01 Penegakan Hukum

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang penyelesaian kasus hukum, budaya hukum, dan pemberdayaan aparatur hukum.

02 Hukum Internasional

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang hukum laut, hukum dirgantara, dan hukum humaniter.

03 Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang pemajuan hak asasi manusia, perlindungan, dan penghormatan hak asasi manusia.

HN PERTAHANAN NEGARA

00 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pertahanan negara.

00 Doktrin dan Strategi Pertahanan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyelenggaraan forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/*workshop* tentang isu di bidang doktrin dan strategi pertahanan.

01 Intelijen Pertahanan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyelenggaraan forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/*workshop* tentang isu di bidang doktrin dan penyelidikan,



pengamanan, dan penggalangan pertahanan, serta ancaman intelijen terhadap negara.

02 Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyelenggaraan forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/*workshop* tentang isu pertahanan di bidang wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar serta tata ruang pertahanan.

03 Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyelenggaraan forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/*workshop* tentang isu di bidang potensi, kekuatan, dan kemampuan pertahanan serta kerja sama pertahanan.

01 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pertahanan negara.

02 Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pertahanan negara.

00 Doktrin dan Strategi Pertahanan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang doktrin dan strategi pertahanan.

01 Intelijen Pertahanan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang doktrin dan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan pertahanan, serta ancaman intelijen terhadap negara.

02 Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu pertahanan di bidang wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar serta tata ruang pertahanan.

03 Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan



Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang potensi, kekuatan, dan kemampuan pertahanan serta kerja sama pertahanan.

KM KEAMANAN DAN KETERTIBAN

00 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat.

00 Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat, dan Obyek Vital Nasional

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyelenggaraan forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/*workshop* tentang isu di bidang intelijen keamanan, bimbingan masyarakat, dan obyek vital nasional.

01 Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyelenggaraan forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/*workshop* tentang isu di bidang penanganan kejahatan konvensional dan kejahatan terhadap kekayaan negara.

02 Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyelenggaraan forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/*workshop* tentang isu di bidang penanganan kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa.

03 Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan tentang termasuk penyelenggaraan forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/*workshop* isu di bidang penanganan konflik dan kontijensi konflik, dan keamanan transportasi.

01 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan



Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan nasional.

02 Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang keamanan nasional.

00 Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat, dan Obyek Vital Nasional

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang intelijen keamanan, bimbingan masyarakat, dan obyek vital nasional.

01 Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang penanganan kejahatan konvensional dan kejahatan terhadap kekayaan negara.

02 Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang penanganan kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa.

03 Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang penanganan konflik dan kontijensi konflik, dan keamanan transportasi.

KB KESATUAN BANGSA

00 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesatuan bangsa.

00 Wawasan Kebangsaan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyelenggaraan



forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/*workshop* tentang isu di bidang materi wawasan kebangsaan, etika, dan karakter bangsa.

01 Memperteguh Ke-Bhinneka-an

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyelenggaraan forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/*workshop* tentang isu ke-bhinneka-an di bidang kerukunan suku dan umat beragama, dan pembauran bangsa dan kearifan lokal.

02 Kewaspadaan Nasional

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyelenggaraan forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/*workshop* tentang isu di bidang potensi ancaman ideologi, sosial, dan budaya serta peningkatan kewaspadaan masyarakat.

03 Kesadaran Bela Negara

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyelenggaraan forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/*workshop* tentang isu di bidang bela Negara di lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, dan pendidikan.

01 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesatuan bangsa.

02 Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa.

00 Wawasan Kebangsaan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang materi wawasan kebangsaan, etika, dan karakter bangsa.

01 Memperteguh Ke-Bhinneka-an

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu



ke-bhinneka-an di bidang kerukunan suku dan umat beragama, dan pembauran bangsa dan kearifan lokal.

02 Kewaspadaan Nasional

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang potensi ancaman ideologi, sosial, dan budaya serta peningkatan kewaspadaan masyarakat.

03 Kesadaran Bela Negara

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang bela Negara di lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, dan pendidikan.

KI KOMUNIKASI DAN INFORMASI

00 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang komunikasi dan informasi.

00 Informasi Publik dan Media Massa

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyelenggaraan forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/*workshop* tentang isu di bidang informasi publik, kehumasan, dan media massa.

01 Telekomunikasi dan Informatika

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyelenggaraan forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/*workshop* tentang isu di bidang telekomunikasi dan informatika.

01 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang komunikasi dan informasi.

02 Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang komunikasi dan informasi.

00 Informasi Publik dan Media Massa



Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang informasi publik, kehumasan, dan media massa.

01 Telekomunikasi dan Informatika

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang telekomunikasi dan informatika.

AP APARATUR DAN REFORMASI BIROKRASI NASIONAL

00 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang aparatur dan reformasi birokrasi nasional

00 Tata Kelola Pemerintahan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyelenggaraan forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/*workshop* tentang isu di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, manajemen sumber daya manusia, pengawasan aparatur, dan reformasi birokrasi nasional.

01 Peningkatan Pelayanan Publik

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyelenggaraan forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/*workshop* tentang isu di bidang pelayanan barang dan jasa dan pelayanan administrasi.

01 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang aparatur dan reformasi birokrasi nasional.

02 Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang aparatur dan reformasi birokrasi nasional

00 Tata Kelola Pemerintahan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, manajemen



sumber daya manusia, pengawasan aparatur, dan reformasi birokrasi nasional.

01 Peningkatan Pelayanan Publik

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang pelayanan barang dan jasa dan pelayanan administrasi.

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan,



Gama Haryo Putro

